

**DAMPAK PENERAPAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN
DATA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa), KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGAWASAN, DAN KERUMITAN PELAPORAN
TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh :

Adi Teja Nugraha
NIM 18.22.7142

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

**DAMPAK PENERAPAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN
DATA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa), KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGAWASAN, DAN KERUMITAN PELAPORAN
TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Derajat Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun Oleh :

Adi Teja Nugraha
NIM 18.22.7142

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Adi Teja Nugraha
NIM : 18.22.7142
Jurusan : Akuntansi
Judul : DAMPAK PENERAPAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN
DATA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa), KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGAWASAN, DAN KERUMITAN PELAPORAN
TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA

Disetujui dan disahkan :

Hari : Senin

Tanggal : 4 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Pardi, SE., MM., MH.

Mengetahui,

Kepala Program Studi Akuntansi



Astuning Saharswi, SE., M.Ak

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adi Teja Nugraha
NIM : 18.22.7142
Jurusan : S1 Akuntansi
Judul : DAMPAK PENERAPAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN
DATA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa), KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGAWASAN, DAN KERUMITAN PELAPORAN
TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji Skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan memenuhi gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 11 Agustus 2022

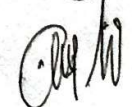
Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Pardi, SE., MM., MH.

()

Anggota I : Arif Farida, SE., MA.

()

Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



Dr. Pardi, SE., MM., MH.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi Teja Nugraha

NIM : 14.22.7142

Jurusan : Akuntansi

Judul : DAMPAK PENERAPAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN
DATA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa), KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGAWASAN, DAN KERUMITAN PELAPORAN
TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi saya adalah hasil plagiat dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia membatalkan gelar kesarjanaan saya atau bersedia dihukun dengan undang-undang yang berlaku.

Pembuat Pernyataan,



Adi Teja Nugraha

MOTTO

Adi Teja Nugraha

“Tidak ada yang sulit, jika Alloh memberi pertolongan. Tidak ada yang mustahil, jika Alloh sudah memberi jalan.”

Q.S. Al. Insyiroh : 5

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Anonim

“Ikhtiar saja dulu, berhasil atau tidak Alloh yang menentukan. Tugas kita hanya memperjuangkan. Jangan lupa Alloh maha adil dalam memutuskan”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Alloh SWT, atas segala pertolongan dan berkat-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua penulis
- Seluruh keluarga penulis
- Seluruh sahabat yang tersayang
- Keluarga besar Pemerintah Desa Wirogunan, Kartasura
- Keluarga besar Pemerintah Desa se-Kecamatan Kartasura,
- Keluarga besar Pemerintah Kecamatan Kartasura
- Keluarga besar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
- Keluarga besar Kaur Perencanaan se-Kecamatan Kartasura, dan
- Keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

**DAMPAK PENERAPAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN DATA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa),
KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGAWASAN,
DAN KERUMITAN PELAPORAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN DESA**

**Adi Teja Nugraha
18.22.7142**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor sistem informasi akuntansi pada sistem yang diterapkan di Pemerintah Desa, kemampuan sumber daya manusia, dan sistem pengawasan terhadap kualitas pelaporan keuangan di Desa. Penelitian ini terdiri dari beberapa variabel independen antara lain penggunaan aplikasi, kemampuan sumber daya manusia, sistem pengendalian, dan kerumitan penyusunan pelaporan yang akan diteliti apakah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan sebagai variabel dependen. Penelitian ini berjenis data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 pegawai yang terlibat dalam sistem keuangan desa, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Kuisioner diuji dengan validasi dan reliabel. Teknik analisis data yang digunakan antara lain metode analisa data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan hasil yang menunjukkan penerapan sistem pengolahan data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kemampuan sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan kerumitan pelaporan berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Kata Kunci : Sistem Keuangan Desa, Kemampuan Sumber Daya Manusia, Sistem Pengawasan Pelaporan, Kerumitan Pelaporan, Kualitas pelaporan.

**DAMPAK PENERAPAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN DATA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD_{Desa}),
KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGAWASAN,
DAN KERUMITAN PELAPORAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN DESA**

**Adi Teja Nugraha
18.22.7142**

ABSTRACT

This research aims to know the effect of implementation accounting system in the village government, capabilities of human resources, monitoring systems, and complexity of the report on the quality of financial reporting in the village. This research concern on several independent variables are accounting system, human resources, monitoring systems, and complexity of the reports which will be investigated whether they affect the quality of financial reporting in the village as the dependent variable. This research is a quantitative data type. The population in this research is 100 employees which were involved in the financial data processing system in the village, all population are used as a sample. This research method includes data analysis methods using data quality tests, classical assumption, and multiple regression analysis with result is showing simultaneously and partially of the quality of financial reporting on the village.

Keywords : Village Accounting System, Human Resources, Monitoring Systems, and Quality of Financial Reporting in the Village

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Alloh SWT, atas berkat dan rahmatnya setiap hari sehingga penulis bisa menyusun skripsi yang berjudul **DAMPAK PENERAPAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN DATA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa), KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGAWASAN, DAN KERUMITAN PELAPORAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA** yang dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan syarat memperoleh derajat Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Pardi, SE., MM., MH. selaku ketua yayasan STIE Surakarta dan dosen pembimbing skripsi.
2. Ibu Astuning Saharsiwi, SE., M.Ak selaku kepala program studi Akuntansi.
3. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen STIE Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama kuliah.
5. Rekan-rekan Pemerintah Desa se-Kecamatan Kartasura yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman penulis yang juga memberikan semangat agar skripsi ini selesai sesuai target.
8. Teman-teman transfer S1 Akuntansi yang juga saling memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
9. Semua pihak dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka diperlukan saran dan masukan yang membangun dari pembaca, agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik lagi. Akhir kata, semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh pihak yang bersangkutan.

Surakarta, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Sistem.....	7
B. Sistem Informasi Akuntansi.....	7
C. Sumber Daya Manusia	8
D. Pengertian Desa.....	9
E. Teori Standar Akuntansi Pemerintahan	9
F. Pengelolaan Keuangan Desa	10
G. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	13
H. Akuntabilitas	16
I. Penelitian Terdahulu	18

J. Kerangka Pemikiran.....	21
K. Hipotesis.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Metode Penelitian.....	25
B. Populasi dan Sampel	26
C. Teknik Sampling	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Definisi Operasional Variabel.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa	40
B. Data Responden	44
C. Analisis Data	46
1. Pengujian Kualitas Data	46
2. Pengujian Asumsi Klasik	49
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	52
4. Pengujian Hipotesis	55
D. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Keterbatasan Penelitian.....	64
C. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1	Jumlah Responden.....	27
Tabel 4.1	Data Responden.....	44
Tabel 4.2	Hasil Uji Reabilitas.....	46
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas X1	47
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas X2	47
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas X3	48
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas X4	48
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Y	49
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolineritas	50
Tabel 4.10	Tabel Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser.....	51
Tabel 4.11	Hasil Analisa Regresi Linear Berganda	53
Tabel 4.12	Hasil Uji t (Parsial).....	55
Tabel 4.13	Hasil Uji F (Simultan)	58
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	21
Gambar 4.1	Tampilan Antar Muka SISKEUDES.....	41
Gambar 4.2	Susunan Organisasi PPKD	41
Gambar 4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	51
Gambar 4.4	Kurva Uji t X1 terhadap Y	56
Gambar 4.5	Kurva Uji t X2 terhadap Y	57
Gambar 4.6	Kurva Uji t X3 terhadap Y	57
Gambar 4.7	Kurva Uji t X4 terhadap Y	58
Gambar 4.8	Kurva Uji F Penerapan Aplikasi Pengolahan Data APBDesa, Kemampuan Sumber Daya Manusia, Sistem Pengawasan, dan Kerumitan Pelaporan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Desa.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Tabulasi Data Kuesioner

Lampiran 3. Hasil Uji Kualitas Data

Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Lampiran 6. Hasil Uji t, Uji F, Uji R^2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparatur pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik. (*Good Village Governance*) (Wiguna dkk, 2017).

Dalam hal mewujudkan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik terutama pengelolaan dana desa, maka desa yang menerima dana desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi yang diperuntukan desa ini, pada tahun 2015 diberi label SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sebagai standar pelaporan APBDes. Dalam perjalanannya SIMDA berubah nama menjadi Siskeudes dan mulai disosialisasikan ke desa-desa di Indonesia. Tujuan utama adanya aplikasi siskeudes yaitu agar aparatur pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan desa.

Sebagai sebuah sistem yang dikemas secara aplikasi berbasis pada sistem informasi akuntansi untuk membantu pengelolaan keuangan desa berdasarkan

atas peraturan yang berlaku, prinsip efektivitas didalam penggunaan aplikasi siskeudes sangat diperlukan agar penggunaan keuangan desa dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, dilaksanakan dengan perencanaan hingga pertanggung jawaban yang cepat, akurat, transparasi, dan akuntabel. Sebagai salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi, efektivitas penggunaan siskeudes dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: keterlibatan pemakai pengguna, kemampuan teknik personal sistem informasi, ukuran organisasi, dukungan top manajemen, formalisasi pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (Komara, 2005).

Secara umum, kualitas sumber daya manusia yang terampil sangat diperlukan dalam penggunaan suatu sistem. Mengingat aplikasi siskeudes merupakan suatu sistem informasi akuntansi yang wajib digunakan bagi desa yang menerima dana desa serta berbasis komputerisasi, maka aparatur desa yang dalam hal ini adalah sekretaris desa selaku penanggung jawab mengelola administrasi desa dan bendahara desa selaku pembuat pertanggung jawaban laporan keuangan desa dituntut untuk mampu menguasai ilmu akuntansi dan komputer sehingga pelaporan pertanggung jawaban dana desa melalui aplikasi siskeudes menjadi lebih baik dan efektif. (Wiguna, dkk 2017)

Hubungan kualitas sumber daya manusia dengan efektivitas penggunaan siskeudes mengacu pada penelitian yang dilakukan Caecilia dan Marthen (2014), yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah

daerah. Artinya jika kualitas sumber daya manusia tinggi maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah juga tinggi.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Sapartiningsih, dkk, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya, dkk. (2017) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Pemahaman, Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng menyimpulkan bahwa aparat desa harus memiliki keahlian serta kompetensi agar aktifitas SISKEUDES berjalan dengan lancar, pengawasan eksternal dari INSPEKTORAT pun harus diperketat agar penggunaannya dapat berjalan dengan baik dan menghindari tindakan-tindakan kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa. Pada penelitian ini, belum dibahas tentang ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Masalah yang ditemukan ketika diterapkannya penggunaan sistem tersebut, tidak semua perangkat desa mampu dan memahami cara penggunaan sistem tersebut, bahkan ada beberapa perangkat desa yang tidak mampu

mengoperasikan komputer, masih ditemukannya beberapa kesalahan dalam penginputan data penganggaran maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta tingkat kerumitan penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan yang berimbas kepada molornya penyerapan anggaran.

Motivasi penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan sistem keuangan desa, tingkat kemampuan perangkat desa yang menangani sistem ini, pengawasan yang dilakukan, serta tingkat ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dengan hal ini, penulis akan melakukan penelitian dengan judul :
“DAMPAK PENERAPAN SISTEM APLIKASI PENGOLAHAN DATA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa), KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGAWASAN, DAN KERUMITAN PELAPORAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan sistem aplikasi pengolahan data anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?
2. Apakah Kemampuan Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?
3. Apakah Sistem pengawasan berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?

4. Apakah Tingkat Kerumitan Pelaporan berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pelaporan keuangan desa;
2. Untuk mengetahui kemampuan sumber daya manusia yang menjadi operator aplikasi SISKEUDES,
3. Untuk mengetahui apakah sistem pengawasan yang telah dilakukan berjalan dengan baik atau tidak, dan;
4. Untuk mengetahui apakah kerumitan pelaporan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan baru tentang Penerapan Sistem Informasi Desa (SISKEUDES) dalam pelaporan keuangan desa, kemampuan sumber daya manusia yang menjadi operator SISKEUDES, serta bagaimana sistem pengendaliannya sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa.

- b. Mengetahui langkah langkah yang ditempuh pemerintah desa dalam mewujudkan laporan keuangan yang baik, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dalam penerapan kinerja sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa mendatang yang lebih baik mengenai faktor kinerja SIA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem

Sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan, komponen tersebut berhubungan erat satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri, mereka saling berinteraksi dan saling membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran suatu sistem dapat tercapai (Hall, 2009).

Sebuah sistem dirancang untuk digunakan dalam aktivitas yang sifatnya berulang. Semua sistem terdiri dari beberapa bagian yang saling terikat dan berhubungan satu sama lainnya untuk berinteraksi sehingga menghasilkan suatu tujuan tertentu.

B. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2006) yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan.

Sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2008) merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi manajemen yang berstruktur pula.

Sebagai sebuah sistem yang dikemas secara aplikasi berbasis pada sistem informasi akuntansi untuk membantu pengelolaan keuangan desa berdasarkan atas peraturan yang berlaku, prinsip efektivitas didalam penggunaan aplikasi siskeudes sangat diperlukan agar penggunaan keuangan desa dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, dilaksanakan dengan perencanaan hingga pertanggung jawaban yang cepat, akurat, transparasi, dan akuntabel. Sebagai salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi, efektivitas penggunaan siskeudes dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: keterlibatan pemakai pengguna, kemampuan teknik personal sistem informasi, ukuran organisasi, dukungan top manajemen, formalisasi pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (Komara, 2005).

C. Sumber Daya Manusia

Secara umum, kualitas sumber daya manusia yang terampil sangat diperlukan dalam penggunaan suatu sistem. Mengingat aplikasi siskeudes merupakan suatu sistem informasi akuntansi yang wajib digunakan bagi desa yang menerima dana desa serta berbasis komputerisasi, maka aparatur desa yang dalam hal ini adalah sekretaris desa selaku penanggung jawab mengelola administrasi desa dan bendahara desa selaku pembuat pertanggung jawaban laporan keuangan desa dituntut untuk mampu menguasai ilmu akuntansi dan komputer sehingga pelaporan pertanggung jawaban dana desa melalui aplikasi siskeudes menjadi lebih baik dan efektif. (Wiguna, dkk 2017).

Hubungan kualitas sumber daya manusia dengan efektivitas penggunaan siskeudes mengacu pada penelitian yang dilakukan Caecilia dan Marthen (2014), yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh

positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya jika kualitas sumber daya manusia tinggi maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah juga tinggi.

D. Pengertian Desa

Desa diberi kekuasaan mengelola keuangan desa secara mandiri dan melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Setiap desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada atasan, dan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi keuangan desa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Teori Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi akuntansi pada umumnya bertujuan untuk

menyajikan atas informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Setiap lembaga pemerintahan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan transaksi. Pencatatan tersebut mencakup administrasi negara, pelaporan, dan pengontrolan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi pemerintah merupakan pengaplikasian ilmu akuntansi di bidang keuangan pemerintah yang khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran.

Oleh sebab itu, akuntansi pemerintahan berperan untuk mengarahkan, mengendalikan, menjaga dan melaporkan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh suatu organisasi pemerintahan. Pengelolaan keuangan dalam suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan efektif, efisien, dan ekonomis karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki oleh organisasi pemerintahan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan seringnya kecurangan yang terjadi terutama dalam hal pengelolaan keuangan.

F. Pengelolaan Keuangan Desa

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparatur pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola

pemerintahan desa yang baik. (Good Village Governance) (Wiguna dkk, 2017).

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 29 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya pada pasal 30 dijelaskan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara basis kas. Yaitu pencatatan transaksi dilakukan pada saat kas diterima maupun dikeluarkan dari Rekening Kas Desa.

Pengelolaan keuangan Desa dapat menggunakan sistem informasi yang di kelola Kementerian Dalam Negeri. Laporan keuangan desa wajib dilaporkan berupa Anggaran, buku kas, buku bank, buku pajak, dan laporan realisasi anggaran (LRA) oleh Pemerintahan Desa. Pengelolaan keuangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan keuangan desa.

Desa bertanggung jawab mengurus urusan pemerintahan (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1) dan kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 27).

Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusung dkk (2018) menjelaskan bahwa prosedur yang digunakan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes ini ada 4 (empat) tahap antara lain :

1. *Tahap Perencanaan.* Pemerintah Desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) , RAB adalah mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa, serta biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. *Tahap Pelaksanaan.* Tahap implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain.
3. *Tahap Penatausahaan.* Merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi untuk menatausahakan proses yang telah terjadi dari tahap pelaksanaan dan perencanaan APBDesa.

4. *Tahap Pelaporan.* Tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu.

G. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Sapartiningsih dkk, 2018).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib untuk mengelola keuangan desa secara transparan (terbuka), akuntabel dan partisipatif. Dimana transparan berarti terbuka dan jujur kepada masyarakat, akuntabel berarti dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, maupun seluruh lapisan masyarakat dan yang terakhir adalah partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusannya, dan keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang berlaku.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 2 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dengan adanya asas transparan atau aspek keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi atas kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa. Transparansi menjadi fungsi penting terkait pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil suatu keputusan penting yang berdampak bagi banyak pihak, pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dilakukannya.

Pengawasan dalam kegiatan keuangan desa memiliki beberapa lapis antara lain :

1. Pengawasan Internal

- a. Kepala Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa selama 1 tahun berjalan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan serta mengawasi kegiatan tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 poin C berbunyi bahwa BPD memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja Kepala Desa.

- c. Masyarakat

Masyarakat berhak memantau dan mengawasi proses pembangunan desa sesuai yang tertera pada Pasal 82 ayat 1 sampai dengan 5. Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Apabila masyarakat memiliki keluhan terhadap kegiatan pembangunan desa, mereka dapat menyampaikannya kepada Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa.

2. Pengawasan Eksternal

a. Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 112 sampai dengan pasal 115 Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di desa, antara lain melakukan pembinaan teknis terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi Pembiayaan Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Indah Hanifah (2015) membuktikan bahwa laporan keuangan desa telah dilakukan dengan baik namun masih belum sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa karena masih dicatat ke buku kas harian bukan menggunakan buku kas umum karena keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, serta sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas belum

melakukan pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang seharusnya di catat ke dalam buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran.

H. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban daerah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang pertanggungjawaban bahwa:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

I. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Eko Febri Lusiono Suharman (2017)	ANALISIS PENERIMAAN APLIKASI SISKEUDES DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS	Kegunaan Persepsian (X1), Kemudahan Penggunaan Persepsian (X2), Sikap Terhadap Menggunakan Teknologi (X3), Minat Perilaku Menggunakan Teknologi (X4), Penggunaan Teknologi Sesungguhnya (Y)	Variabel X1, X2, X3 berpengaruh signifikan positif terhadap Penggunaan Teknologi Sesungguhnya. Variabel X4 tidak berpengaruh terhadap Penggunaan Teknologi Sesungguhnya.
I Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi	PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN DAN	Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Pendidikan dan Pelatihan (X2), Peran Pendamping Desa	Semua Variabel berpengaruh terhadap Efektifitas Penggunaan SISKEUDES

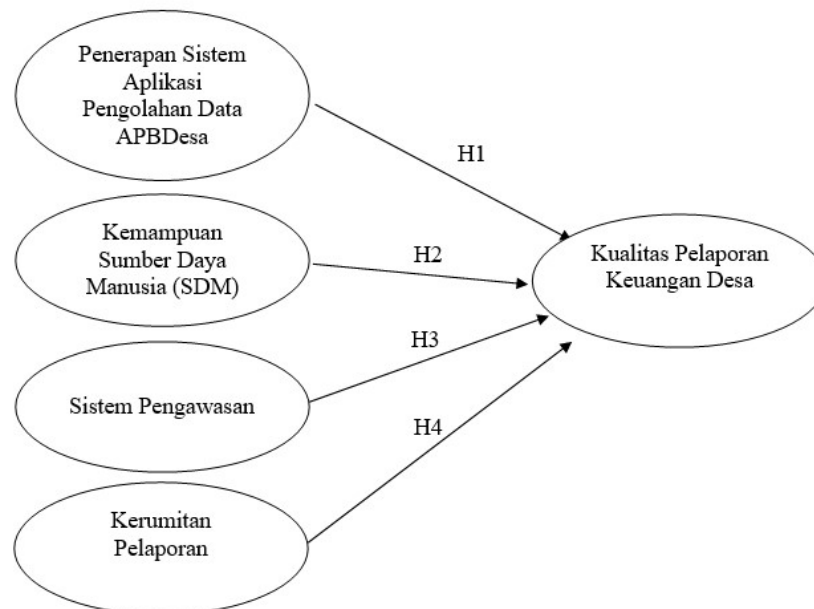
Yuniarta, Made Aristia Prayudi (2017)	PELATIHAN, SERTA PERAN PENDAMPING DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) (STUDI PADA DESA PENERIMA DANA DESA DI KABUPATEN BULELENG)	(X3), Efektifitas Penggunaan SISKEUDES (Y)	
<i>I Kadek Yani Bimarta Prasetya ., Made Aristia Prayudi, S.A., M.Sc., Ak. ., I Putu Gede Diatmika,SE. AK., M.Si. (2017)</i>	PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA, PEMAHAMAN, DAN PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS SISTEM KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BULELENG	Kompetensi Sumber Daya (X1), Pemahaman (X2), Pengawasan (X3), Kualitas Penerapan SISKEUDES (Y)	Kompetensi Sumber Daya berpengaruh signifikan namun dalam arah yang negatif terhadap Kualitas Penerapan SISKEUDES, Pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Penerapan SISKEUDES, dan Pengawasan berpengaruh Positif signifikan terhadap Kualitas Penerapan SISKEUDES
Fatmaliza, Syamsir, Jumiyati (2018)	KONTRIBUSI PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA PERANGKAT NAGARI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR	Periode Kerja (X1), Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan (X2), Penguasaan Terhadap Pekerjaan dan Peralatan (X3), Pengelolaan Keuangan Nagari (Y)	Semua Variabel berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari.
Diyah Santi Hariyani, Se., M.Si,	ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI	Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa (X), Penggunaan	Variabel berpengaruh positif signifikan terhadap Penggunaan

Muhamad Agus Sudrajat, Se., M.Si (2016)	APARATUR PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM PADA DESA-DESA DI KABUPATEN MADIUN	<i>Accounting Information System</i> (Y)	<i>Accounting Information System</i>
Dwi Sapartiningsih, Suharno, Djoko Kristianto (2018)	ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Partisipasi Penganggaran (X3), Pengawasan (X4), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Semua Variabel berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Caecilia Henny Setya Wati, Marthen Adrian Izaak Nahumury (2014)	PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN MERAUKE	Kualitas Sumber Daya Manusia (X), Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)	Variabel X berpengaruh positif signifikan terhadap Variabel Y
Dian Irma Diani (2014)	PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN	Pemahaman akuntansi (X1), Pemanfaatan SIAKD (X2), Peran Internal Audit (X3), Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Variabel X1 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y, Variabel X2 tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y, Variabel X3

	DAERAH DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)		berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y
Emilda Ihsanti (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan SAKD (X2), Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Variabel X1 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y, variabel X2 tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y

J. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran seperti berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari variabel tersebut terhadap kualitas pelaporan keuangan di Pemerintah Desa.

Keterangan Kerangka Pemikiran :

a. Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penerapan Sistem Informasi Desa (SISKEUDES) (X₁)
- 2) Kemampuan Sumber Daya Manusia (X₂)
- 3) Sistem pengawasan (X₃)
- 4) Kerumitan Penyusunan Laporan (X₄)

b. Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yang termasuk dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelaporan Keuangan (Y)

K. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan variabel bebas dan variabel terikat tersebut diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Penggunaan Aplikasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Penerapan SISKEUDES ini sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, karena penggunaan sistem ini dapat meminimalisir kesalahan dalam penghitungan anggaran, meminimalisir salah input, dan meminimalisir terjadinya *double entry* dalam penginputan

data karena penyusunan anggaran keuangan desa ini sangat kompleks memuat berbagai macam sumber pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ihsanti (2014) menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan asumsi diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Penggunaan aplikasi diduga berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

2. Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi operator aplikasi SISKEUDES ini mempengaruhi terhadap kualitas pelaporan keuangan karena operator harus bisa menggunakan perangkat komputer dengan baik, dan menguasai tentang aplikasi tersebut.

Dalam prakteknya operator SISKEUDES bekerja dengan kompetensi yang berbeda-beda, sehingga setiap desa dapat menghasilkan kualitas laporan yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Deva Premana dkk (2017) menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan asumsi tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kemampuan Sumber Daya Manusia diduga berpengaruh dalam Kualitas Pelaporan Keuangan.

3. Pengaruh Sistem pengawasan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, selalu ada pengawasan dari internal maupun eksternal demi menjaga kualitas pelaporan dan kegiatan yang bebas dari penyimpangan atau melanggar aturan-aturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Irma Diani (2014) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan asumsi tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sistem pengawasan diduga berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

4. Pengaruh Kerumitan Pelaporan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, terdapat regulasi-regulasi yang mengatur hal tersebut. Bahkan pada setiap sumber dana berbeda-beda cara penyusunan laporan pertanggungjawabannya sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama untuk penyusunan laporan pertanggungjawabannya, namun harus dituntut cepat dalam menyelesaikannya yang berimbas dikesampingkannya kualitas pelaporan keuangannya. Dari asumsi tersebut diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Kerumitan Pelaporan diduga berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem aplikasi pengolahan data apbdesa, kemampuan sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan kerumitan pelaporan terhadap kualitas pelaporan keuangan desa, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem aplikasi pengolahan data anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan desa, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan penggunaan aplikasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa adalah terbukti kebenarannya.
2. Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan desa, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa adalah terbukti kebenarannya.
3. Sistem pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan desa, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan sistem pengawasan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa adalah terbukti kebenarannya
4. Kerumitan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan desa, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan

kerumitan pelaporan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan desa adalah terbukti kebenarannya.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti berikutnya agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi. Adapun keterbatasan tersebut adalah :

1. Ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup pada pemerintah Desa se Kecamatan Kartasura sehingga hasil penelitian ini hanya terfokus pada satu wilayah saja sedangkan untuk sistem pelaporan keuangan desa ini telah digunakan di seluruh pemerintah Desa yang ada di seluruh Indonesia.
2. Peneliti hanya menggunakan variabel independen yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan hanya terbatas pada penerapan aplikasi pengolahan data APBDesa, kemampuan sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan kerumitan pelaporan. Padahal masih terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi.

C. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat, maka peneliti mengajukan beberapa saran :

1. Untuk Pemerintah
 - a. Pada variabel penerapan sistem aplikasi pengolahan data anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) pengaruhnya cukup besar. Saran penulis agar dapat lebih memaksimalkan lagi penggunaan

aplikasi tersebut agar dapat terciptanya kualitas pelaporan keuangan desa yang memenuhi prinsip transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pada variabel kemampuan sumber daya manusia pengaruhnya sangat kecil terhadap kualitas pelaporan keuangan desa dibandingkan dengan variabel penerapan aplikasi pengolahan data APBDesa, sistem pengawasan, dan kerumitan pelaporan. Saran penulis agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang menangani pelaporan keuangan desa agar lebih baik lagi.
- c. Pada variabel sistem pengawasan pengaruhnya cukup besar. Saran penulis bagi pihak eksternal yang mengawasi kualitas pelaporan keuangan desa agar dapat lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan, serta pembinaan kepada pemerintah Desa agar terciptanya laporan keuangan yang semakin baik dan terhindar dari kesalahan-kesalahan administrasi yang seharusnya tidak terjadi.
- d. Pada kerumitan pelaporan pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan variabel sistem penerapan sistem aplikasi pengolahan data APBDesa, kemampuan sumber daya manusia, dan sistem pengawasan. Saran penulis agar dapat mempermudah proses dalam penyusunan laporan keuangan yang dirasa peneliti cukup rumit dan banyak tahapan yang harus dilalui sehingga dapat lebih efisien dan semakin cepat dalam melakukan penyusunan laporan keuangan desa dengan tidak mengurangi kualitas pelaporannya.

2. Untuk Penelitian Mendatang

- a. Penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan obyek dan sampel yang jauh lebih luas lagi agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan mendapatkan gambaran secara lebih jelas tentang kualitas pelaporan keuangan desa.
- b. Karena variabel bebas dalam penelitian ini merupakan salah satu hal penting dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, maka hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi diluar variabel yang sudah ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2006). *Accounting Information System*. Yogyakarta: ANDI.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman).
- Hall, J. A. (2009). *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariyani, D. S., & Sudrajat, M. A. (2016). Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Teknologi Accounting Information System Pada Desa-Desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 5*, 113-127.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- Komara, A. (2005). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *SNA VIII*, 836-848.
- Lusiono, E. F., & Suharman. (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi SISKEUDES di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
- Prasetya, I. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, I. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya, Pemahaman, dan Pengawasan Terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 14*, 100-114.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Susanto, A. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia.
- Syamsir, Fatmaliza, & Jumiati. (2018). Kontribusi Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Education on Social Science*, 85-98.

- Wati, C. H., & Nahumury, M. A. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Merauke.
- Wiguna, I. D., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektifitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Buleleng)

KUISIONER PENELITIAN

Berikut ini adalah kuisioner yang berkaitan dengan **PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES), KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGAWASAN, DAN KERUMITAN PELAPORAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA**. Oleh karena itu, kami memohon dengan hormat kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuisioner berikut ini guna melancarkan penelitian kami.

Atas kesediaan dan partisipasi dari bapak/ibu, kami mengucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Usia : a. < 25 Tahun b. 26-35 Tahun c. 36-40 Tahun d. >40 tahun (*)
Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita (*)
Jabatan : a. PKPKD b. Koordinator PPKD c. Bendahara PPKD d. Anggota PPKD (*)
(*) : Coret salah satu

DAFTAR KUISIONER

Mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan tanda centang (V) pada setiap jawaban yang dipilih.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
N : Netral
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

No	Pertanyaan	Keterangan				
		STS	TS	N	S	SS
X1 : Penerapan Sistem Keuangan Desa (Lusiono, 2017)						
1	Tersedianya perangkat keras/hardware yang menunjang untuk pengoperasian aplikasi Siskeudes					
2	Tersedianya Jaringan Internet (Berbasis Kabel/Nirkabel) yang mumpuni untuk pengoperasian Siskeudes					
3	Aplikasi Siskeudes mudah untuk dioperasionalkan					
4	Aplikasi Siskeudes terkoneksi dengan jaringan internet dalam pengoperasiannya					
5	Aplikasi Siskeudes membantu untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan di Desa					
X2 : Kemampuan Sumber Daya Manusia (Wiguna, dkk 2017)						
1	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa dapat menggunakan Aplikasi Siskeudes secara baik					
2	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa memahami konsep penganggaran, dan pengelolaan keuangan desa					
3	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa memahami aturan-aturan yang mengikat dalam penyusunan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa					

No	Pertanyaan	Keterangan				
		STS	TS	N	S	SS
4	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa diberikan pelatihan untuk penyusunan/penatausahaan laporan keuangan desa					
5	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dapat memahami keluaran/output dari Siskeudes					
X3 : Pengawasan (Prasetya, dkk 2017)						
1	Pembagian Wewenang, Tugas, dan Tanggungjawab sudah sesuai dengan Tupoksi masing-masing dari Kepala Desa/PKPKD					
2	Adanya kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan desa					
3	Adanya supervisi/monitoring dari eksternal pemerintah desa (Inspektorat/BPKP/BPK)					
X4 : Kerumitan Pelaporan (Penulis)						
1	Pelaporan keuangan desa sudah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku					
2	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa melakukan pengecekan terhadap dokumen pelaksanaan kegiatan sebelum dibuat laporan keuangan					
3	Koordinator PPKD melakukan verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatan yang akan dibuat laporan keuangan					
4	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa telah memahami prosedur penyusunan pelaporan keuangan desa					
5	Kelengkapan dokumen pendukung penyusunan pelaporan keuangan desa sudah memenuhi syarat					
Y : Kualitas Pelaporan Keuangan (Ihsanti, 2014)						
1	Dokumen yang dihasilkan dari aplikasi Siskeudes dapat dipergunakan dan dapat dipertanggungjawabkan					
2	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dapat mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan desa					
3	Badan Permusyawaratan Desa dapat menerima dan menyetujui laporan keuangan desa dengan membaca hasil laporan dari aplikasi Siskeudes					
4	Pihak eksternal (Inspektorat/BPKP/BPK) dapat menerima hasil pelaporan keuangan secara baik					